KINERJA KEJAKSAAN AGUNG KOLABORASI PENEGAK HUKUM

DALAM MEMPERBAIKI WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A.JUNAEDI KARSO

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG KOLABORASI PENEGAK HUKUM

DALAM MEMPERBAIKI WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi merupakan bahaya laten yang mempunyai daya rusak yang maha dasyat bagaikan ledakan bom atom di hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus karena berdampak pada kerugian negara baik secara material maupun secara moral bagi generasi penerus, sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional.

Disaat Kepercayaan publik terhadap citra institusi Polri, awal Juli 2022 terpuruk, karena perilaku oknumnya (Irjen Pol Ferdy Sambu yang melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya yakni Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat), kini KPK nilainya rapotnya merah, pasca di tetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri pertanian RI (Syahrul Yasin Limpo) oleh Polda Metro jaya pada tanggal 22 November 2023.

Disaat citra buruk melebele institusi penegak hukum yakni: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) awal Juli 2022 dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca di tetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri pertanian RI (Syahrul Yasin Limpo) oleh Polda Metro jaya pada tanggal 22 November 2023. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil menorehkan prestasi yang sangat baik dan membanggakan, dimana Kejaksaan Agung telah berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.42,70 triliun, dan 61.948.551 dollar Amerika Serikat; Kerugian perekonomian negara Rp.109,5 triliun, yang bersumber dari perkara PT AMU, LPEI, Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma Grup, Taspen dan BTS 4G Kominfo dan Kerugian keuangan negara sebesar Rp.8,82 triliun, serta penyelamatan dan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya Rp.1,1 triliun. Kinerja Kejaksaan Agung, Koloborasi Penegak Hukum dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ini mendapat apresiasi dari publik

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202412306

ISBN 978-623-120-234-5
9 786231 202345

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG, KOLABORASI PENEGAK HUKUM DALAM MEMPERBAIKI WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Junaedi Karso

eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG, KOLABORASI PENEGAK HUKUM DALAM MEMPERBAIKI WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-234-5

No. HKI : EC00202412306

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada "Allah SWT" atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang "Kinerja Kejaksaan Agung, Kolaborasi Penegak Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia".

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait "Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras pribadi, namun kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, google, website, para ahli serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih, belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga "Allah SWT", membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
BAB 2 PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PROGRAM KERJA PRIORITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....22
A. Peran, Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan.....22
B. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi 31
C. Tindak Pidana Korupsi 43
D. Pemberantasan Korupsi 48
E. Konsep Kerugian Keuangan Negara 62
F. Proses Penyidikan Menurut Sistematika KUHAP.....77
G. Tindak Pidana Korupsi 83
H. Kendala Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....98
BAB 3 KOLOBORASI, KEJAKSAAN, KEHAKIMAN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, KEPOLISIAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.....107
A. Korupsi Indonesia.....107
B. Kolaborasi Pemberantasan Korupsi.....116
C. Kejaksaan.....119
D. Hakim 125
E. Badan Pemeriksa Keuangan 128
F. Jaksa Agung Beberkan Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi 151
G. Polisi.....167
H. TNI dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam Penegakan Hukum 181

BAB 4 SENGKARUT PETAKA PENDEKAR PENEGAK HUKUM KINERJA KEJAKSAAN AGUNG PERBAIKI WAJAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 194

A. Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia 194

B. Publik Menilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Buruk 203

C. Kinerja Kepolisian dalam Penegakan Hukum..... 219

D. Kepercayaan Rakyat ke TNI dan Polri Kalahkan KPK..... 230

E. Kejaksaan Republik Indonesia 259

F. Kinerja Kejaksaan Agung Perbaiki Wajah Penegakan Hukum 280

G. Kisah Penegak Hukum Penjagal Koruptor di Indonesia..... 285

H. Daftar Jaksa Agung Indonesia 295

DAFTAR PUSTAKA 306

KINERJA KEJAKSAAN AGUNG, KOLOBORASI PENEGAK HUKUM DALAM MEMPERBAIKI WAJAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Junaedi Karso

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara[1].

Dikutip dalam kpk.go.id, (2023-09-02) Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah

---

[1] Oky Riza Wijayanto,Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2007

BAB 2

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PROGRAM KERJA PRIORITAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Peran, Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan

1. Peran Jaksa Dalam Pemerintahan

Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak[11].

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran

---

[11] Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, h.1

BAB 3

KOLOBORASI, KEJAKSAAN, KEHAKIMAN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, KEPOLISIAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Korupsi Indonesia

Secara umum korupsi menyebabkan mutu pelayanan publik berkurang dan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan uang suap yang diberikan. Izinkan saya mengambil contoh terkait dengan Pengurus SIM dan KTP, Paspord yang telah ditentukan prosedur, tarif dan jangka waktunya bisa diakali dengan memberi ongkos tambahan petugas. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum jika dalam pengurusan kedua urusan tersabut dan juga jasa pelayanan publik lainnya, menjadi tempat para mafia dan calo mencari nafkah. Mereka bekerja sama dengan orang dalam yang turut andil mengabaikan prosedur baku yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini merugikan, misalnya, untuk sebagian orang yang lebih dulu mendaftar tetapi tidak mempinyai uang lebih untuk menyogok petugas. Mereka yang berkantong tipis biasanya kurang dipedulikan oleh petugas. Dalam lingkungan yang koruptif, ekonomi dan bisnis dijalankan tidak berdasarkan biaya yang nyata. Banyak sekali unsur biaya yang sulit dipertanggung jawabkan yang di sebut biaya siluman. Akibatnya percuma saja di gembar-gembor murahnya tenaga kerja Indonesia sementara faktor biaya ini tidak bisa di kendalikan. Pada gilirannya, ekonomi biaya tinggi ini membuat produk indonesia tidak kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional. Korupsi juga akan membawa efek lanjutan berupa menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan yang tidak selayaknya telah menguntungkan sekelompok orang dan menafikkan orang banyak. Tidak saja di bidang ekonomi, korupsi juga memiliki

BAB 4

SENGKARUT PETAKA PENDEKAR PENEGAK HUKUM KINERJA KEJAKSAAN AGUNG PERBAIKI WAJAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Sengkarut Petaka di Lingkaran Pendekar Hukum

Dilansir dalam laman Wikipedia (2024) Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus 1945, tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa[127]ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah.

Begitu pula dalam beberapa tahun ini Bom Atom berupa ketidakadilan dijatuhkan oleh penegak hukum kepada masyarakat di Indonesia, sehingga menyebabkan terbunuhnya ratusan juta jiwa meninggal, lalu apa yang meninggal, (1). Meninggalnya (wafatnya penegakan hukum yang berdasarkan ketuhanan, keadilan, kemanusian) di Indonesia; (2). Meninggalnya ketidak adilan di publik; dan (3). Meninggalnya rasa malu, denka-denki moral yang sangat buruk dikalangan pendekar hukum, dimana seharusnya beliau-beliau menjadi suri tauladan bagi tegaknya keadilan dan kebenaran di Indonesia.

---

[127] https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Saat Manusia Sekarat, Pada bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 09.43 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A.Junaedi Karso (2020), Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Penerbit Zahir Publishing, Sleman Yogyakarta.

Abdul Latif, (2002). Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Sabaruddin, Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

AbdulkadirMuhammad dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Adrian Sutedi, (2012). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik, Inklusif, Dan Kolaborasi, Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press, 2015.

Agus Pramusinto, dkk, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Alastair Evans, (2008). The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Corruption, New York: Transparency International. Arief Amrullah, (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang, Money Laundering, Malang: Bayumedia Publishing.

Ali, Achmad., 2004, Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, Maret, 2008.

Artidjo Alkostar, korupsi Politik di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995.

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik"

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016, Jakarta: Biro Penelitian dan Pengembangan BPK RI.

Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper, "Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", MPKP, FE,UI.2006.

Bandung: Alumni.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009.

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009.

Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Beni Kurnia Illahi & Muhammad Ikhsan Alia (2017) Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK Integritas Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017

BPKP, PSP : Petunjuk Pelaksaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan

Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, Juni 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Emily R. Lai, Collaborations: A Literature Review, Research Report, Pearson, 2011.

Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Eva Ahjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Semarang: Sinar Grafika, 2005.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Semarang: Sinar Grafika, 2005.

Friedman, Lawrence M., 1984, American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton & Company.

Friedman, Lawrence M., 2013, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Bandung : Nusa Media.

Gunarto Suhardi, Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia, Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004.

Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Harnold Ferry Makawimbang, (2015). Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Yogyakarta: Thafa Media bekerja sama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan Kerugian Keuangan Negara (PSA PKKN).

Hartanti, Evi. 2005 Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika

Harun M. Husein, Penyidikan Dan Penentuan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hermansyah, (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Hernold ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Hernold Ferry Makawimbang, Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta 2015.

I Dewa Gede Atmadja, (2015). Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press dan Anggota IKAPI.

Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Jimly Asshiddiqie, (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).,(2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Jimly Assiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Laporan Kinerja Kejaksaan Agung RI Tahun 2022

Lawrence Friedmann, (1971). The State and The Rule of Law in Mixed Economy, London: Steven & Son.

Lawrence Friedmann, (1971). The State and The Rule of Law in Mixed Economy, London: Steven & Son. Lilik Mulyadi, (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Bandung: Alumni.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta: Djambatan, 2004.

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Center for International Legal Cooperation (CILC).

Lilik Mulyadi, (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya,

Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009.

Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban, Terjemahan: Rini Adriati, Jakarta: DepKumHam, 2003.

Mochtar Lubis & James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1995.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009

Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972.

Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003.

Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, FH Universitas Indonesia, Jakarta 1979.

Philiphus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-2, Gajahmada University Press, Yogyakarta,2012.

Philipus M. Hadjo., Tatiek Sri Djatmiati., Anddink. G.H., Ten Berge.,J.B.J.M, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,Gadjah Mada University Press, 2011.

Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, (Gadjah MadaUniversity Press), Yogyakarta, 2011.

Purwadi, A., (2013), "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah", Perspektif, 18(2).

R. Wiyono, (2005). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2008.

Rahardi, H. Pudi. 2007. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rahayu, S., (2011), "Pembangunan Masyarakat Madani dan Pemerintah Yang Bersih Sebagai Perwujudan Tata Kelola Yang Baik" ProBank, 1(7).

Reksodiputro, Mardjono., 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia

_____, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Ridwan, Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Ridwan, Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok: Pena Multi Media, 2008.

Romli Atmazasmita, (1996). Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Rineka Cipta.

Romli Atmazasmita, (1996). Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Rineka Cipta.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007.

Sadjijono. 2008. Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Govenance. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakakarta: Laksbang Pressindo.

Satipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Yogyakarta, Genta Press, 2009.

_____,, Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas Jakarta, 2000.

_____,, Membedah Hukum Progresif, Kompas Jakarta, 2007 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

Satjipto Rahardjo, (2006). Menggagas Hukum Progresif di Indonesia, Semarang: Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, (2006). Menggagas Hukum Progresif di Indonesia, Semarang: Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,Bandung, t.t, Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara,Setara Press, Malang, 2015.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta, 2009.

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2012). Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2012). Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk., (2015). Obstructon of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Books.

Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk., (2015). Obstructon of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Books.

Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia, UI-press, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983.

Soetandyo Wignjosoebroto, (2013). Hukum dalam Masyarakat, Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soetandyo Wignjosoebroto, (2013). Hukum dalam Masyarakat, Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum Dalam Masyarakat" (Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum", FISIP Unair, Surabaya, 2007.

Soetandyo Wignjosoebroto, "Korupsi Sebagai Masalah Sosial-Budaya", Jurnal Dinamika Masyarakat, Jakarta, Ristek, 2004.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977.

Suhendar, (2015). Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi, Malang: Setara Press.

Suhendar, (2015). Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi, Malang: Setara Press.

Sutan Remy Sjahdeni, (2007). Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sutan Remy Sjahdeni, (2007). Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syech Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 1980.

Theodorus M Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Salemba empat, 2009.

W. Ryawan Tjandra, (2014). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

W. Ryawan Tjandra, (2014). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Bali: BPHN, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Vorkink-Von Hoeve.Bandung.

yech Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 1980.

Yopie Morya Immanuel Patiro, (2012). Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Keni Media.

Yopie Morya Immanuel Patiro, (2012). Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Keni Media.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Desertasi, Seminar

Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4242/31

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justitia IV, Universitas Parahyangan, 2000.

e-journal.uajy.ac.id/7868/diakses ulang padan tanggal 15 Januari 2024, pukul 08.13 WIB.

Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Konar Zuber, (20170 Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Halaman. 382-393 Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017

Lina Maulidian, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbanakn Nasional di Indonesia, " Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2014.

Moh. Tamsil Tamrin (2019) *Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM Parigi Mautong* Email : tamsil984@gmail.com

Muhammad Fakhri Amir, Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Maret 2020, Vol.5, No. 1 , h . 66

Mustopadidjaja AR, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003.

Oky Riza Wijayanto , Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2007

RM Syah Arief Atmaja W. & Agung Nur Probohudono, (2015). Analisis Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) 01, Volume 1, November 2015, Jakarta: Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

RM Syah Arief Atmaja W. & Agung Nur Probohudono, (2015). Analisis Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) 01, Volume 1, November 2015, Jakarta: Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

Soebroto, A.C., dan Arif Christiono, (2012), "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas", In Legal Position of Regulations/Policies Under The Regulation of the Minister for National Development Planning/Head of Bappenas) http://birohukum.bappenas.go.id/data/databerita/WORKSHOP%20 Peraturan., Vol. 20.

Taufiqurrahman Ruki, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia, Majalah Hukum Nasional No. 2, Jakarta: BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI, 2005.

Theodorus M. Tuanakotta, menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, hlm. 144 dikutip dari Chandra Ayu Astuti, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam http://eprints.undip.ac.id/46612/1/08_ ASTUTI.pdf

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Website, Google

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Peranan berarti pekerjaan yang dilakukan, menjalankan, melaksanakan, berkedudukan atau bertugas dikutip dari http://kbbi.web.id/Peranan, diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 23.00 WIB.

http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp- ikatan-advokat-indonesia diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 23.29 WIB.

https://aclc.kpk.go.id/ Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, diakses pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 15.30 WIB.

https://jeo.kompas.com/ Citra Polri Setelah Rekayasa Sambo Terbongkar, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 13.45 WIB.

http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan seputar kerugian-keuangan- negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana, diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 19.57 WIB.

https://www.bpkp.go.id/ Pengertian Keuangan Negara, diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 20.22 WIB

https://www.bpkp.go.id/ Kerugian Keuangan Negara, diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 20.24 WIB

https;//pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000, diakses ulang pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 20.44 WIB

Understanding Collaboration, http://www.mste.uiuc.edu/presentations/MSP/nov07/NCLBWhite Paper.pdf

https://republika.co.id/Fuji Pratiwi, Jaksa Agung Beberkan Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi, diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 11.28 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160603185223-78-135710/ Elisa Valenta Sari, ojk-gandeng-kejaksaan-agung-tangani-kasus-sektor-keuangan,diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 11.21 WIB.

https://www.antaranews.com/ Putu Indah Savitri, Jaksa Agung: Keterbukaan OJK dukung penegakan hukum oleh Kejaksaan, diakses pada tanggal 7 Januari 2024, pukul 11.24 WIB

https://www.tempo.co/M Julnis Firmansyah, TNI dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.30 WIB

https://www.lawupost.com/ TNI dan Kejagung RI Kerja Sama Peningkatan SDM dan Kinerja, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.34 WIB

https://www.antaranews.com/ Putu Indah Savitri, Herry Soebanto, Kejagung-TNI mantapkan sinergi melalui diklat perkara koneksitas, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.11 WIB.

https://beritasulteng.id/category/nasional/ Kejagung RI Dan TNI Kerjasama Saling Mendukung Program, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.40 WIB

https://www.beritariau.com/ Kejaksaan RI- TNI dan MA Teken MoU Optimalkan Penanganan Perkara Pidana & Koneksitas, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.04 WIB.

https://www.gemanusantara.id/ Terima Kunjungan Puspom TNI, Jaksa Agung: Pererat Kerja Sama Perkara Koneksitas, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 13.08 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Saat Manusia Sekarat, Pada bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 09.43 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/12/13232191/timeline-kasus-pembunuhan-brigadir-j-hingga-berujung-hukuman-mati-, diakses pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 09.53 WIB.

https://kabar24.bisnis.com/read/20231123/16/1717149/ Surya Dua Artha Simanjuntak, lengkap-kronologi-kasus-pemerasan-firli-bahuri-hingga-ditetapkan-tersangka#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%E2%80%93%20Polda,%2F11%2F2023)%20malam, diakses diakses pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 10.07 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Survei Indikator: Mayoritas Publik Menilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Buruk, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.28 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Survei Kompas: Mayoritas Warga Tak Puas dengan Kinerja KPK, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.19 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/vika-azkiya-dihni, Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.21 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai

Oktober 2023, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.30 WIB

https://www.kompas.id/kategori/polhuk, Hidayat Salam, Integritas KPK Mengeropos, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.55 WIB

https://www.kompas.id/kategori/riset, Rangga Eka Sakti, Tantangan Menjaga Momentum Citra Positif KPK, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.49 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar, Anggaran Kepolisian Dalam 1 Dekade Terakhir (2013-2022), diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.37 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat, Ini Besaran Gaji Polisi, dari Pangkat Tertinggi sampai Terendah, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.38 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika, Kepercayaan Terhadap Polri Paling Rendah Dibanding Lembaga Penegak Hukum Lainnya, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.16 WIB

https://jeo.kompas.com/ Citra Polri Setelah Rekayasa Sambo Terbongkar, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 13.45 WIB.

https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/61ac66e0a0aa9/DesySetyowati, survei-indikator-kepercayaan-rakyat-ke-tni-dan-polri-kalahkan-kpk, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.18 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar, Akibat Kasus Ferdi Sambo, Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Menurun, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.34 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar, Jumlah Pelanggaran Disipin, Kode Etik, dan Pidana Anggota Polri (2021), diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.35 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Survei Indikator: Pungli Jadi Hal Utama yang Perlu Dibenahi Polri, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.41 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur, Survei: Mayoritas Publik Percaya Ada Praktik Setoran ke Atasan di Polri, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.42 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Ini Layanan Kepolisian yang Paling Menyita Waktu menurut Survei Populi, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.45 WIB

https://theconversation.com/id, Cara Polri merespons vonis Ferdy Sambo dapat memperbaiki – atau memperburuk – citra kepolisian, diakses pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 11.50 WIB.

https://tangsel.suara.com/ Yanti Agustjik, Hasil Survei Charta Politika, Kepercayaan Masyarakat pada Polri Menurun 18%, Imbas Kasus Ferdy Sambo, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.18 WIB.

https://epaper.mediaindonesia.com/Pentingnya Mempertahankan Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.03 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-6595060/Zunita Putri, survei-lsi-tren-kepercayaan-publik-ke-polri-meningkat, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.10 WIB

https://jurnalborneo.co.id/tentang-kami/Kepercayaan Masyarakat kepada Polri Naik jadi 80,2%, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.06 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad, Survei LSI, Masih Banyak Warga yang Menilai Penegakan Hukum RI Telah Baik, diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 23.13 WIB.

https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar, Kejaksaan Agung Selidiki Korupsi Penyalahgunaan Impor Garam Industri, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.02 WIB

https://www.gatra.com/news-561721-hukum-ini-8-kasus-korupsi-kakap-rp144-triliun-yang-ditangani-kejagung-pada-2022.html

https://www.gatra.com/Iwan Sutiawan, Ini 8 Kasus Korupsi Kakap Rp144 Triliun yang Ditangani Kejagung pada 2022, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.07 WIB

https://jambi.antaranews.com/, Kejagung tangani perkara korupsi capai Rp 152 triliun, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.16 WIB

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917183705-12-695963/daftar-kasus-korupsi-kakap-diusut-kejagung-3-tahun-terakhir, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.17 WIB.

https://jikalahari.or.id/Nurul Fitria, Kejagung Sudah Tetapkan Perusahaan Sawit Duta Palma Group Sebagai Tersangka Korupsi, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.26 WIB

https://purwokerto.inews.id/ Erfan Ma'ruf, Surya Darmadi, Tersangka Korupsi Terbesar dalam Sejarah, Kejagung Terus Sita Aset, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.30 WIB.

https://www.antaranews.com/ Laily Rahmawaty, Kinerja Kejaksaan Agung perbaiki wajah penegakan hukum, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 11.57 WIB.

http://www.statusaceh.net/ Jalan terjal para jagal koruptor, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.46 WIB

https://www.alinea.id/Fandy Hutari, Mereka yang Dihabisi Karena Memberantas Korupsi, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 00.38 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Daftar Jaksa Agung Indonesia, diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 23.29 WIB.

http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/2013/06/ketidak-percayaan-masyarakat-terhadap.html diakses Kembali pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 23.02 WIB.

https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/27/ Rahmat Fajar Nugraha,respons-hasil-survei-ipi-pbnu-apresiasi-meningkatnya-kepercayaan-publik-kepada-polri, diakses pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 14.15 WIB.

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, pasal 1 angka 1 tentang Kejaksaan.

Indonesia.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang TIPIKOR

Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Indonesia.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Indonesia.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202412306, 3 Februari 2024
Pencipta		
Nama	:	**A. Junaedi Karso**
Alamat	:	Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**A. Junaedi Karso**
Alamat	:	Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat 45256
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Kinerja Kejaksaan Agung, Kolaborasi Penegak Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	3 Februari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000587677

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.